

Judul : Malam ini Golkar tentukan Munaslub: Airlangga siap "bertarung" dengan Aziz Syamsuddin
Tanggal : Rabu, 13 Desember 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 4

Malam Ini Golkar Tentukan Munaslub Airlangga Siap "Bertarung" dengan Aziz Syamsuddin



Ketua Umum Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 HR Agung Laksono (kedua kanan), Presiden Ketiga RI selaku Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar BJ Habibie (kedua kiri), Wakil Ketua Umum Kosgoro yang juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kanan), dan Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham (kiri) berbincang saat menghadiri Pembukaan Mukernas Kosgoro, di Jakarta, Selasa (12/12). Dalam kegiatan tersebut Kosgoro mendesak Partai Golkar segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mencari ketua umum yang baru.

[JAKARTA] Penentuan Ketua Umum Partai Golkar bakal diputuskan dalam musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Malam ini, pengurus pusat Golkar akan menggelar rapat pleno untuk menentukan penyelenggaraan Munaslub. Surat undangan rapat pleno telah disampaikan ke sejumlah pengurus.

"Partai Golkar bakal menggelar rapat pleno malam ini di DPR," kata sumber SP, Rabu (13/12).

Dia mengemukakan, rapat pleno bakal dihadiri petinggi partai. Utamanya adalah membahas Munaslub. "Ada usulan yang ingin Munaslub digelar sebelum 19 Desember ini," katanya.

Sebelumnya Airlangga Hartarto sudah mendapat dukungan dari sejumlah DPD I Golkar untuk menggantikan posisi Setya Novanto. Belakangan Aziz Syamsuddin menyatakan siap untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar.

Sementara itu, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan surat penunjukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aziz Syamsuddin yang ditandatangani Setya Novanto masih akan dibicarakan dalam rapat pleno hari ini.

"Masih akan kita bicarakan dalam rapat Golkar, apakah proses kembali dilanjutkan ataukah dihentikan," kata Nurdin Halid, Rabu (13/12).

Menurut Nurdin, penunjukan Ketua DPR memang harus dibicarakan dalam rapat pleno. Sehingga di situ akan diputuskan apakah nanti akan disetujui atau tidak. "Kalau disetujui maka kita lanjutkan," tutur dia.

Namun, kata Nurdin, jika surat itu ditolak maka Golkar akan memilih kembali calon ketua DPR yang baru lantaran tak boleh ter-lalu lama kosong. Sebab, jabatan Ketua DPR merupakan hak Golkar untuk usai Setya Novanto mengundurkan diri.

Nurdin mengatakan, banyak kader Golkar yang layak berpotensi menduduki jabatan tersebut Ketua DPR. "Pokoknya banyak kader Golkar di fraksi yang memiliki potensi menjadi ketua DPR," ucap Nurdin.

Tak Langgar Aturan

Terkait penunjukan ketua DPR oleh Setya Novanto, Nurdin mengungkapkan hal itu wajar saja dan tak melanggar aturan, tapi tetap harus dilakukan rapat pleno. "Boleh saja ketua umum mengambil hak diskresinya tapi harus tetap dibicarakan dalam rapat pleno. Maka surat ini kita

angkat untuk dibicarakan di rapat pleno," katanya.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, pimpinan DPR telah menerima surat resmi pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR pada Senin (11/12). Para pimpinan pun langsung membahasnya dalam rapat pimpinan.

Dalam rapat pimpinan tersebut, kata Taufik, hadir pula Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Keahlian DPR untuk mengkaji dari semua sisi termasuk Tata Tertib dan UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Surat pengunduran diri dilampiri surat-surat lain, ada sekitar enam surat dari Fraksi Partai Golkar dan DPP Partai Golkar," kata Taufik.

Taufik mengatakan, rapat pimpinan DPR disepakati perlu ada pembahasan

dalam dinamika sehingga *alhamdulillah* disepakati musyawarah mufakat," kata Taufik.

Di tempat terpisah, bakal calon (balon) Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar (PG) Airlangga Hartarto (AH) menyatakan siap bertarung memperebutkan Ketua PG melawan Aziz Syamsuddin. Dia menghormati semua kader yang ingin bertarung karena mempunyai hak yang sama.

"Semua kader punya hak dan kesempatan untuk maju. *Insyallah*, saya siap," kata AH usai mengikuti acara Mukernas Kosgoro 1957, di Jakarta, Selasa (12/12).

Ia tidak mau mengungkapkan strategi untuk meraih kemenangan karena itu adalah rahasia timnya. Termasuk jumlah dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I (provinsi) maupun DPD II (kabupaten/kota). [R-14]

lebih lanjut untuk disampaikan ke pimpinan fraksi-fraksi dalam Rapat Pengganti Bamus. Hal itu karena pimpinan DPR hanya meneruskan surat-surat masuk ke mekanisme berikutnya ke Bamus.

Rapat Pengganti Bamus berjalan biasa saja karena perbedaan pandangan dan penyampaian persepsi itu merupakan bagian